

Faktor Yang Mempengaruhi Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Joni¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau,
jhoni@stithidayatullah.ac.id

Abstract: *Analysis and evaluation of education policy are very important to do in carrying out a policy. But often there is occurring imperfection in achieving the desired. This is due to immature planning, still finding the placement of people who are not suitable in implementing policies, and poor communication. The purpose of this article is to determine the analysis and evaluation of educational policies and the factors that influence it as a deeper knowledge. The method in this article uses literature research. Furthermore, the source of article data is in the form of journal books and other documents. And data flow model analysis techniques. The results of this study indicate that the analysis and evaluation of educational policies are something an effort to solve the problems faced so that a policy is needed to solve these problems. Meanwhile, the factors that influence the analysis and evaluation of educational policies are communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure.*

Keywords: *Factors, Analysis, Evaluation, Policy, Education*

Abstrak: Analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan sangat penting dilakukan dalam menjalankan suatu kebijakan. Namun sering sekali terjadi ketidak sempurnaan dalam mencapai yang diinginkan. Hal ini dikarenakan sebuah rencana yang belum matang, masih ditemui penempatan orang yang belum sesuai dalam menjalankan kebijakan serta komunikasi yang belum baik. Tujuan artikel ini merupakan untuk mengetahui analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya untuk sebagai pengetahuan yang lebih mendalam. Metode dalam artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan. Selanjutnya sumber data artikel berupa buku jurnal dan dokumen lainnya. Dan teknik analisis data analisis Flow Model. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu upaya dalam memecah permasalahan yang dihadapi sehingga perlu diciptakan suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan adalah komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: *Faktor, Analisis, Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan*

PENDAHULUAN

Sebuah satuan pendidikan, instansi, organisasi atau yang lainnya tentu memiliki sebuah program. Dalam hal ini, untuk menyusun suatu program perlu diperhatikannya suatu evaluasi. Terlebih lagi

dalam metode penyusunan kebijakan pendidikan, tentu di perlukan sebuah metode formulasi hingga implementasi kebijakan tercapai. Sehingga dapat dilaksanakannya sebuah evaluasi kebijakan, Dilakukannya evaluasi tersebut berfungsi untuk melihat

Samapai dimana program yang sudah direncanakan, serta dilakukannya berjalan. Sehingga dijadikan perbaikan dalam program yang akan dibuat kedepannya.

Evaluasi perlu untuk dilakukan dalam sebuah kebijakan pendidikan, yang dimana kerangka pelaksanaan akhir dari semua prosedur dalam merumuskan kebijakan. Selanjutnya ketika melaksanakan proses terakhir, sering ditemui beberapa jenis yang dapat dimanfaatkan dalam menilai dampak pelaksanaan kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, sangat penting untuk diperhatikan secara mendalam. Karena di setiap bagian-bagian pendidikan mempunyai kekurangan untuk menjadi bahan perbaikan. Seperti yang sering terjadi pada analisis dan evaluasi kebijakan, yang di mulai dari komunikasi dimana dalam proses pelaksanaan kebijakan sering terjadi kegagalan dalam berkomunikasi antara personal satu dengan personal yang lain.

Selanjutnya disposisi juga memiliki pengaruh dalam kebijakan, hal ini pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dikarenakan karakter personal yang berbeda butuh pemahaman karakter untuk menyamakan dalam suatu program. Selain itu juga terdapat sumber daya manusia, yang dimana dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan personal sehingga hambatan dapat terjadi ketika melaksanakan kebijakan. Dan yang terakhir struktur birokrasi yang terkadang dalam menjalankan kebijakan sudah ada pedoman yang ditentukan namun hal ini sering sekali personal tidak mematuhi pedoman kebijakan yang sudah ditentukan. Selain itu, ketidak sempurnaan kebijakan dalam program untuk memenuhi target sebagian besar berasal dari belum sempurnanya pengelolaan. Maka dari itu, dibutuhkannya sebuah evaluasi saat ini. Melihat hal tersebut, untuk formulasi kebijakan diharapkan dapat menanggulangi terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, sangat berpengaruh factor analisis dan evaluasi kebijakan dalam pendidikan yang memiliki target. Dalam

mengukurnya serta menilai keberhasilan implementasi dengan indikator yang sudah ditentukan. Selain itu, pelaksanaannya evaluasi diharapkan juga mampu mengetahui akibat yang dihadapi dan ketika dalam proses implementasi evaluasi kebijakan dapat meminimalisir kegagalan dalam sebuah kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hal diatas, tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya untuk sebagai pengetahuan yang lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode kepustakaan. Partisipan atau sumber data yang dilaksanakan untuk menyelesaikan penelitian kepustakaan bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal dan dokumen lainnya. Sumber data primer merupakan buku yang ditulis oleh Edward Sallis, dan sumber data sekundernya berupa literatur jurnal (Hadi, 1990).

Analisis data yang dilakukan dalam artikel ini ialah flow model, Miles dan Hubberman menyebutkan dalam bukunya bahwa analisis Flow Model tersusun dari beberapa alur program yang terbentuk dengan beberapa langkah-langkah analisis, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Hubberman., 1992). Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya untuk sebagai pengetahuan yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pendidikan

1. Analisis Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dilaksanakan secara mendalam, diantaranya sebagai perencanaan, pelaksanaan, yang nantinya berefek kepada kebijakan, namun fokusnya terhadap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya metode analisis wajib bergerak dari analisis terhadap suatu

rancangan kebijakan (Irianto Y. B., 2012).

Analisis terhadap keadaan merupakan pelaksanaan dari pilihan rumusan kebijakan dengan menyatakan cerminan yang sempurna, dalam penerapan kebijakan pada seluruh jenjang pelaksana kebijakan. Sebagaimana terdapat dalam suatu perumusan kebijakannya. Setelah itu, problem yang timbul dalam penerapan kebijakan pembelajaran selanjutnya dikaji hingga ditemuinya penyebab yang menjadi penghambat, halangan, kendala untuk melaksanakan kebijakan yang diartikan. Analisis berikutnya ditunjukkan dengan telaah penerapan keilmuan sehingga dapat membangun paradigma yang baru dalam sebuah draft serta teori kebijakan pembelajaran. Pada jenjang tersebut merupakan kebijakan yang dimaksud sebagai mendeteksi draft yang tersusun dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisasi manajemen pembelajaran.

Implementasi terhadap esensi dari manajemen pendidikan, butuh diteliti dari elemen yang menempel pada komposisi pembelajaran nasional, yang dikala ini memegang beban berat untuk mengatasi krisis multidimensional. Bila melihat dari pandangan demokratisasi bahwa pelayanan serta tingkatan kedudukan dan warga dalam melaksanakan pembelajaran yang dikonsepsikan dalam misi serta tugas lembaga pembelajaran, dibutuhkan sesuatu kebijakan yang dimasukkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Maka kebijakan tersebut ialah standar, spesifikasi serta bentuk normatif yang dapat digunakan sebagai menyeleksi bahan masukan untuk dijadikan proses rancangan sehingga menciptakan hasil sebagaimana kemauan, kebutuhan serta keinginan seluruh warga serta negara.

2. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi pendidikan merupakan sesuatu proses untuk memastikan

keputusan terhadap suatu nilai, dengan didasarkan hasil berbagai macam pengamatan yang merujuk pada latar belakang orang untuk mengevaluasi. Melihat penjelasan tersebut secara komperhensif dikarenakan penilaian/ evaluasi tersebut ialah sesuatu proses dalam menentukan sebuah keputusan terhadap nilai dari suatu yang dinilai berdasarkan pada hasil dari bermacam pengamatan melalui latar belakang orang untuk mengevaluasinya (Nurmawanti, 2016).

Dari uraian diatas terkait penafsiran penilaian atau evaluasi, kebijakan, serta kebijakan pendidikan, hingga dapat ditarik kesimpulan jika penafsiran dari penilaian kebijakan pendidikan merupakan suatu evaluasi serta perbandingan yang dicoba dengan berbagai hasil pengamatan dengan terencana serta tidak berubah- ubah dalam tercapainya suatu komponen kebijakan ialah pelaksana kebijakan, area kebijakan, serta kebijakan publik yang cocok dengan keputusan suatu kebijakan pemerintah terkait bidang pembelajaran secara kuantitatif serta bisa dipertanggung jawabkan.

3. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan adalah suatu kata yang selalu terdengar dalam kerangka politik maupun ketatanegaraan. Kata kebijakan mempunyai jangkauan yang luas. Istilah “*policy*” ialah menagani problem atau kebutuhan publik, selain itu memiliki pengertian sebagai administrasi pemerintah (Hasbullah, 2015).

Kata kebijakan (*Policy*) sewaktu-waktu dicampuradukkan bersama kata kebijaksanaan (*wisdom*) (Nugroho, 2009). Oleh karena itu, kedua kata tersebut memang memiliki kedekatan dalam hal pengucapan. Namun sesungguhnya kedua kata tersebut memiliki pengertian yang amat jauh berbeda. Sistem pembuatan kebijakan dilandasi dengan pertimbangan akal. Melihat hal tersebut, daya pikir manusia adalah bagian yang sangat menonjol dalam mengambil hasil

dari beragam pilihan. Selanjutnya kebijaksanaan banyak terpengaruh aspek emosional dalam sistemnya. Selain itu, kebijaksanaan juga bukan berarti tiada memuat komponen-komponen rasional di internalnya. Bisa jadi, komponen-komponen tersebut belum terjangkau atau intuisi.

Kebijakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti mengambil dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karangan Syaiful Syagala memiliki makna yaitu kepintaran, kecakapan, kebijaksanaan, kumpulan konsep dan pokok yang menjadi markah dasar dalam rencana penerapan pekerjaan, kepemimpinan dan metode berbuat oleh pemerintah, lembaga dan sebagainya merupakan maklumat cita-cita, asas-asas atau maksud untuk menjadi garis pedoman ketika mencapai tujuan (Syagala, 2008).

Selanjutnya Nanang Fatah mengambil dari buah pikiran Hogwood dan Gun yang memilah kebijakan sebagai *brand* untuk bidang aktivitas. Kebijakan sebagai ungkapan umum dari target umum atau suatu kondisi yang diinginkan. Terlebih lagi kebijakan sebagai ketetapan ketatanegaraan, kebijakan sebagai pemberian kuasa yang resmi, Selanjutnya kebijakan juga sebagai agenda (Fatah, 2013).

Beragam pendapat tentang kebijakan maka dapat ditarik kesimpulan dalam garis besar bahwa kebijakan merupakan kepintaran, kecakapan, kumpulan konsep dan pokok yang menjadi markah dasar dalam rencana penerapan pekerjaan. Dalam melaksanakan suatu aktivitas didasarkan dengan suatu ketetapan dari pimpinan. Oleh karena itu, untuk membedakan aturan yang telah ada dan melibatkan seseorang atas terdapatnya alasan yang bisa diterima. Seperti hendaknya tidak melaksanakan aturan yang aktif karena satu argumen yang kuat (Soyomukti, 2010).

Faktor Yang Mempengaruhi Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Sebuah keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan akan ditetapkan oleh berbagai macam variabel serta factor, dan tiap-tiap variabel tersebut sama-sama terkait dengan satu yang lain. Untuk menambah pemahaman kita terkait macam-macam variabel yang terikat didalam implementasi, Oleh karena itu, perlunya pembatasan dalam riset ini ialah peneliti memilih strategi yang diungkapkan oleh Edwards III. Gambaran Edwards III bahwasanya pelaksanaan kebijakan disebabkan dari empat faktor, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Sumar, 2018). Dari beberapa faktor tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan lainnya.

1. Komunikasi

Pelaksanaan tersebut berjalan efektif jika ukuran serta capaian kebijakan sudah dimengerti oleh setiap personal serta memiliki tanggungjawab untuk tercapainya arah kebijakan. Ketepatan ukuran dan tercapainya arah kebijakan sangat penting agar dikomunikasikan secara cermat dengan personal yang melaksanakan. Kestabilan melalui ukuran dasar serta tujuan harus dikomunikasikan sehingga personal yang melaksanakan dapat mengetahui secara akurat ukuran dan tujuan kebijakan tersebut.

Komunikasi dalam lembaga adalah suatu mode yang sangat kompleks dan dilematis. Secara personal bisa saja dapat menahannya karena untuk kebutuhan tertentu, atau memberitahukannya. Selain itu, asal informasi yang berlainan juga dapat menimbulkan interpretasi yang bertentangan pula. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, orang yang bertanggungjawab dalam merealisasikan sebuah keputusan wajib mengetahui apakah personal dapat melakukannya.

Sebenarnya pelaksanaan kebijakan wajib diterima terhadap semua individu serta harus mengerti dengan pasti dan akurat terkait keinginan

maupun tujuan kebijakan itu sendiri. Jika para pelaku pembuat kebijakan sudah memandang ketidaksesuaian spesifikasi kebijakan seyogyanya mereka belum mengerti apa sebenarnya yang akan dibuat sebagai pedoman. Melihat hal tersebut, personal yang melaksanakan kebijakan pasti bingung terhadap apa yang dilakukan. Maka pada pelaksanaannya, jika menekankan kepada personal mendapatkan suatu capaian yang tidak optimal. Oleh karena itu, kurangnya komunikasi bersama para implementor dengan intens. Akan berdampak pada implementasi kebijakan.

Terdapat tiga indikator untuk dilakukan dalam pengukuran ketercapaian aspek komunikasi, yakni:

- a. Transmisi, adalah tindakan pemberian komunikasi yang bagus sehingga dapat menghasilkan satu hasil pelaksanaan yang baik. Namun hal ini, sering terjadi dalam metode transmisi ini yang merupakan salah pengertian, Kejadian ini akibat komunikasi implementasi yang terkandung telah melalui tahapan-tahapan birokrasi, sehingga yang diinginkan terdistorsi pada pelaksanaannya (Winarno, 2014).
- b. Kejelasan informasi, merupakan bentuk komunikasi yang diterima melalui personal pelaksana kebijakan dianjurkan jelas serta tidak meragukan informasi yang disampaikan. Kepastian informasi kebijakan juga bukan selalu untuk menghalangi pelaksanaan kebijakan, hal ini terlihat pada tataran khusus personal yang melaksanakan memerlukan fleksibilitas dalam mengimplementasikan kebijakan, tetapi dalam tataran yang berbeda ini justru dapat menyelewengkan keinginan yang hendak diperoleh setiap kebijakan yang sudah ditentukan.
- c. Konsistensi informasi merupakan intruksi sebuah informasi yang disebarkan dalam implementasi suatu komunikasi dengan jelas dan selaras untuk dapat diaplikasikan serta

dijalankan. Apabila intruksi telah diberikan selalu berubah-ubah mengakibatkan kebingungan bagi yang menjalankan.

2. Sumber daya manusia

Jika melihat penjelasan diatas apabila sebuah komunikasi sudah jelas dan tidak berubah- ubah maka sudah dikatakan baik dalam komunikasi kebijakan tersebut disampaikan. Namun seandainya yang ingin melaksanakan minim sumber daya manusia dalam melaksanakannya, tentu pada pelaksanaannya tidak akan beroperasi secara efektif. Kemudian sumber daya bisa berupa manusia, yaitu kompetensi pelaksanaan serta sumber daya finansial. Melihat hal tersebut SDM merupakan faktor yang berharga dalam melaksanakan kebijakan agar efisien. Oleh karena itu, jika tidak dengan sumber daya manusia, suatu kebijakan sekedar kertas menjelma menjadi dokumen saja.

Elemen- elemen sumber daya manusia mencakup jumlah pegawai, selain itu kemampuan dari para implementasi, serta mampu memahami informasi dengan baik dalam melaksanakan kebijakan seras kebutuhan yang bersumber dalam implementasi program, jadi kewenangan kegiatan bisa diarahkan dengan yang diharapkan, terlebih lagi adanya alat- alat pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan program dengan contoh sarana prasarana serta finansial (Pasolong, 2016).

Selanjutnya sumber daya manusia yang belum sesuai (kuantitas dan keahlian) berdampak tidak dapat diimplementasikannya program secara baik karena mereka belum bisa melaksanakan pengawasan dengan sempurna. Selain itu, apabila jumlah staf sebagai pengimplementasikan kebijakan terbatas oleh karena itu, harus dilakukan penambahan kemampuan individu pelaksana untuk menjalankan program. Untuk itu sangat penting manajemen SDM yang sempurna sehingga dapat

meningkatkan kerja program. Contoh dalam hal ini sebagian sumber daya manusia belum mampu melaksanakan kegiatan ini diakibatkan kebijakan konservasi energy, temuan ini adalah satu hal yang baru untuk mereka mengimplementasikan kegiatan. Yang dimana memerlukan keahlian yang khusus, sehingga personal harus menguasai teknik kelistrikan.

Hubungan Informasi dan sumber daya manusai ialah sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini terdapat dua jenis informasi yakni informasi tentang bagaimana cara mengatasi rencana dalam melaksanakan suatu program. Selanjutnya pelaksana harus memahami aktivitas apa yang mesti dillaksanakan, selain itu data yang terkait data pendukung ketaatan terhadap peraturan kenegaraan. Faktanya yang terjadi dilapangan pimpinan atau pengurus pusat belum sepenuhnya mengetahui tuntutan yang diinginkan disetiap personal dalam menjalankan dilapangan. Hal ini menggambarkan kekurangan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat akibati secara langsung. contohnya personal yang menjalankan tidak bertanggungjawab, atau pelaksana yang tidak masuk ketika jam kerja dengan alasan tidak jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memerlukan kepatuhan organisasi serta personal dan peraturan pemerintah yang sudah ditentukan.

Selain itu, sumber daya sangatlah penting yang merupakan kekuatan dalam menetapkan bagaimana program tersebut dilaksanakan, kewenangan tersebut berupa mengelola keuangan, baik pengadaan uang, staf, atau pengadaan supervisor. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan harus lengkap diantaranya yakni, kantor, peralatan, dan finansial yang memadai. Tanpa fasilitas tentu sangat sulit kebijakan dapat berjalan dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan spesifikasi yang dimiliki dari pelaksana, contoh komitmen, kejujuran, serta perangai demokratis. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kelancaran dalam melaksanakan kebijakan yaitu sikap setiap pelaksana. Jika pelaksana sepakat terhadap bagian isi dalam sebuah kebijakan maka implementor dapat melaksanakan secara senang hati. Namun, jika pandangan implementor berbeda dengan pembentuk kebijakan maka metode pelaksanaan akan mengalami bermacam masalah.

Melihat penjelasan diatas, terdapat tiga jenis sikap pelaksana terkait kebijakan, kesadaran dan pedoman individu dalam menanggapi kebijakan yang diterima atau ditolak, dilihat dari kedalaman tanggapan tersebut. Para implementor mungkin memahami tujuan dan sasaran kebijakan, namun seringkali terjadi kegagalan dalam menjalankan kebijakan/ kegiatan yang sudah disusun. Hal ini dikarenakan pelaksana tidak menerima tujuan yang sudah disusun, sehingga pelaksana terkesan mengalihkan atau menghindari pelaksanaan program. Selain itu dukungan dari pejabat yang melaksanakan sangat penting dalam mencapai target program.

Oleh karena itu, dukungan pimpinan sangat menunjang dalam mengimplementasikan program sehingga tercapainya tujuan yang efektif. Selain itu, bentuk dukungan pimpinan merupakan bagaimana memposisikan kebijakan menjadi yang didahulukan dalam sebuah program dan memposisikan pelaksana sebagai orang yang membantu program sehingga dapat berjalan. Melihat hal tersebut penting adanya pengamatan suku, keseimbangan daerah, jenis kelamin, agama serta kekhususan demografi yang beranekaragam. Selanjutnya penyediaan finansial yang baik bertujuan memberikan insentif untuk para personal

yang menjalankan program dengan tujuan personal tersebut mendukung serta bekerja secara penuh dalam menjalankan program.

4. Struktur Birokrasi

Dalam bagan organisasi atau lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat tinggi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat sebuah aspek struktur yang sangat dibutuhkan dari setiap lembaga, organisasi atau instansi lainnya ialah memiliki standar operasi prosedur. Dengan adanya standar operasi prosedur akan dijadikan acuan untuk setiap pelaksana dalam bertindak.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dapat diambil sebuah kesimpulan dalam analisis dan evaluasi kebijakan merupakan suatu upaya dalam memecah permasalahan yang dihadapi sehingga perlu diciptakan suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan adalah komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Fatah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Hasbullah, H. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta.: Rajawali Pers.
- Hubberman., M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Irianto, Y. B. (2012). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moloeng, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, A. T. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmawanti. (2016). *Evaluasi Pendidikan Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: ALfabeta.
- Soyomukti, N. (2010). *Teori-teori Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Sumar, A. A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Syagala, S. (2008). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service.